

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelian Sebelumnya

Tabel 1 : Penelitian Terdahulu

No	Judul	Metodologi Penelitian	Penulis	Hasil
1	PENYUSUNAN DAN PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN BERDASARKAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN ENTITAS TANPA AKUNTABILITAS PUBLIK (Studi Kasus pada Perusahaan Rokok Trubus Alami)	Penelitian kualitatif dengan metode studi kasus	Arum Puspita Sari (2014)	Perusahaan rokok Trubus Alami belum menyajikan laporan keuangan yang sesuai dengan SAK-ETAP. Dari semua siklus akuntansi perusahaan hanya menerapkan sebagian saja. Laporan laba rugi dan neraca yang disajikan masih belum sesuai dengan SAK-ETAP.
2	PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BERBASIS STANDAR AKUNTANSI	Penelitian kualitatif dengan pendekatan purposive	Viky Diacahya (2014)	Batik Loro Lopo Solo belum melakukan pencatatan akuntansi dan menyusun laporan keuangan berbasis SAK-ETAP. Kendala yang

	KEUANGAN ENTITAS TANPA AKUNTABILITAS PUBLIK(SAK-ETAP) DAN UPAYA PENGEMBANGAN USAHA KECIL MENENGAH PADA PENGRAJIN BATIK			dihadapi adalah kekurangan sumber daya manusia. Dalam pengembangan usahanya Batik Loro Lopo Solo meningkatkan kemampuan teknologi dan kemampuan pemasarannya
3	PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN UNTUK USAH KECIL DAN MENENGAH (UKM) BERBASIS STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN ENTITAS TANPA AKUNTABILITAS PUBLIK (SAK-ETAP)	Penelitian kualitatif dengan metode studi kasus	Hermon Andy Putra Elisabeth Penti Kurniawan (2012)	Kendala - kendala dalam pembuatan laporan keuangan antara lain kurangnya sumber daya manusia yang memiliki kemampuan dalam menyusun laporan keuangan serta kurangnya waktu yang difokuskan untuk membuat laporan keuangan karena waktu yang ada lebih difokuskan pada kegiatan operasional. Aplikasi Microsoft Excel dengan formula dapat mempermudah UKM dalam menghasilkan laporan keuangan berbasis SAK-ETAP.
4	PENYUSUNAN	Penelitian	Abdul	Laporan keuangan yang

	<p>LAPORAN KEUANGAN UMKM BERDASARKAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN ENTITAS TANPA AKUNTABILITAS PUBLIK(SAK-ETAP)</p> <p>(Kasus pada UD. Mabel Novel'1 di Banyuwangi)</p>	<p>kualitatif dengan metode studi kasus</p>	<p>Muchid (2015)</p>	<p>disusun peneliti berdasarkan SAK-ETAP menyajiakn laba bersih yang menunjukan kinerja perusahaan. Posisi keuangan yang disajikan dalam neraca, laporan aruskas menunjukan arus kas dari aktivitas operasi. Catatan atas laporan keuangan menunjukan gambaran umum keuangan UD. Mebel Novel'1</p>
--	--	---	----------------------	--

2.2 Teori yang Mendasari

2.2.1 Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

Usaha Mikro

Usaha Mikro berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Bab I menyebutkan bahwa Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Pada Bab IV Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 menyatakan bahwa kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:

- a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan tempat usaha; atau
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Usaha Kecil

Usaha Kecil berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Bab I menyebutkan bahwa Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Pada Bab IV Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 menyatakan bahwa kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:

- a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan tempat usaha; atau
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

Usaha Menengah

Usaha Menengah berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Bab I menyebutkan bahwa Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Pada Bab IV Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 menyatakan bahwa kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut:

- a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan tempat usaha; atau
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

2.2.2 *Laporan Keuangan*

Laporan Keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Menurut Standar Akuntansi Keuangan yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan. Laporan keuangan entitas menurut SAK ETAP (2009) meliputi:

1. Neraca

Neraca menyajikan aset, kewajiban dan ekuitas pada suatu tanggal tertentu sampai akhir periode pelaporan (SAK ETAP, 2009. 4.1). Neraca minimal mencakup pos-pos berikut:

- a. Kas dan setara kas;
- b. Piutang usaha dan piutang lainnya;
- c. Persediaan;
- d. Property investasi;
- e. Aset tetap;
- f. Aset tidak berwujud;
- g. Utang usaha dan utang lainnya;
- h. Aset dan kewajiban pajak;
- i. Kewajiban diestimasi;
- j. Ekuitas (SAK ETAP, 2009.4.2).

Entitas menyajikan pos, judul dan sub jumlah lainnya dalam neraca jika penyajian seperti itu relevan dalam rangka pemahaman terhadap posisi keuangan entitas (SAK ETAP, 2009.4.3). SAK-ETAP tidak menentukan format atau urutan terhadap pos pos yang disajikan (SAK ETAP, 2009.4.4).

2. Laporan Laba Rugi

Laporan laba rugi memasukan semua pos penghasilan dan beban yang diakui dalam suatu periode kecuali SAK-ETAP mensyaratkan lain. SAK-ETAP mengatur perlakuan berbeda terhadap dampak koreksi atas kesalahan dan perubahan kebijakan akuntansi yang disajikan sebagai penyesuaian terhadap periode yang lalu dan bukan sebagai bagian dari laba atau rugi dalam periode terjadinya perubahan (SAK ETAP, 2009.5.2). Laporan laba rugi minimal mencakup pos-pos sebagai berikut:

- a. Pendapatan;
- b. Beban keuangan;
- c. Bagian laba atau rugi dari investasi yang menggunakan metode ekuitas;
- d. Beban pajak;
- e. Laba atau rugi neto (SAK ETAP, 2009.5.3)

3. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan perubahan ekuitas menyajikan laba atau rugi suatu entitas untuk satu periode, pos pendapatan dan beban yang diakui secara langsung dan ekuitas untuk periode tersebut, pengaruh kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan yang diakui dalam periode tersebut, dan jumlah investasi oleh dan deviden dan distribusi lain kepemilik ekuitas selama periode tersebut (SAK ETAP, 2009.6.2). Entitas menyajikan laporan perubahan ekuitas yang menunjukkan

informasi mengenai laba atau rugi untuk periode, pendapatan dan beban yang diakui langsung dalam ekuitas, pengaruh kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan yang diakui untuk setiap komponen ekuitas, dan suatu rekonsiliasi antara jumlah tercatat awal dan akhir periode diungkap secara terpisah (SAK ETAP, 2009.6.3).

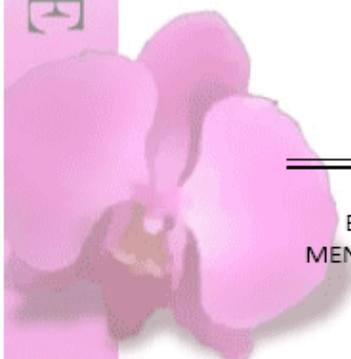
4. Laporan Arus Kas

Laporan arus kas menyajikan informasi perubahan histori atas kas dan setara kas entitas, yang menunjukkan secara terpisah perubahan yang terjadi selama satu periode dari aktivitas operasi, investasi dan pendanaan (SAK ETAP, 2009.7.1). Entitas menyajikan laporan arus kas yang melaporkan arus kas untuk satu periode dan mengklasifikasikan menurut aktivitas operasi, aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan (SAK ETAP, 2009.7.3).

5. Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan yang berisi ringkasan kebijakannya akuntansi yang signifikan dan informasi penjelasan lainnya. Catatan laporan keuangan memberikan penjelasan naratif atau rincian jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan dan informasi pos-pos yang tidak memenuhi kriteria laporan keuangan (SAK ETAP, 2009.8.1). Catatan laporan keuangan harus:

- a. Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi tertentu yang digunakan
- b. Mengungkapkan informasi yang disyaratkan dalam SAK ETAP tetapi tidak disajikan dalam laporan keuangan, dan
- c. Memberikan informasi tambahan yang tidak disajikan dalam laporan keuangan, tetapi relevan untuk memahami laporan keuangan (SAK ETAP, 2009.4.2).



2.2.3 Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik

Ikatan Akuntansi Indonesia telah menerbitkan Standar Akuntansi keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) yang diterapkan untuk penyusunan laporan keuangan yang dimulai pada atau setelah 1 januari 2010. Dengan adanya SAK ETAP ini maka perusahaan kecil seperti UMKM dapat dibantu untuk menyediakan laporan keuangan yang mereka butuhkan. Karena, SAK-ETAP memberikan banyak kemudahan untuk perusahaan dibandingkan PSAK dengan ketentuan pelaporan yang lebih kompleks. Perbedaan secara kasat mata dapat dilihat dari ketebalan SAK-ETAP yang hanya sekitar seratus halaman dengan menyajikan 30 bab.

Sesuai dengan ruang lingkup SAK-ETAP maka standar ini dimaksudkan untuk digunakan oleh entitas tanpa akuntabilitas publik. Entitas tanpa akuntabilitas publik yang dimaksud adalah entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan dan menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum bagi pengguna eksternal. Contoh pengguna eksternal ialah pemilik yang tidak terlibat langsung dalam pengelolaan usaha, kreditur, dan lembaga pemeringkat kredit. Entitas memiliki akuntabilitas publik signifikan jika entitas telah mengajukan pernyataan pendaftaran atau dalam proses pengajuan pernyataan pendaftaran, pada otoritas pasar modal atau regulator lain untuk tujuan penerbitan efek di pasar modal atau entitas menguasai aset dalam kapasitas sebagai fidusia untuk sekelompok besar masyarakat seperti bank, entitas asuransi pialang dll.

Entitas yang laporan keuangannya mematuhi Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) harus membuat suatu pernyataan eksplisit dan secara penuh atas kepatuhan tersebut dalam catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan tidak boleh menyatakan, mematuhi SAK ETAP kecuali jika mematuhi semua persyaratan dan SAK ETAP. Apabila perusahaan memakai Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP), maka auditor yang akan melakukan audit di perusahaan tersebut juga akan mengacu pada SAK ETAP.

2.3 Ringkasan dan Kerangka Pikir Penelitian

Unsur-unsur laporan keuangan menurut SAK-ETAP

Menurut SAK-ETAP unsur-unsur laporan keuangan terdiri dari:

1. Aset

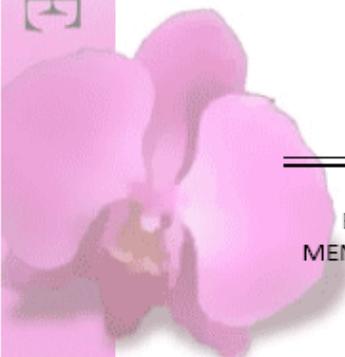
Aset adalah sumber daya yang dikuasai entitas sebagai akibat dari masa lalu dan dari mana manfaat masa depan diharapkan diperoleh oleh entitas (SAK ETAP, 2009:2.12).

Manfaat ekonomi masa depan yang terwujud dalam aset adalah potensi dari aset tersebut untuk memberikan sumbangan, baik langsung maupun tidak langsung, terhadap aliran kas dan setara kas kepada entitas. Arus kas tersebut dapat terjadi melalui penggunaan aset atau pelepasan aset (SAK ETAP, 2009.2.14)

2. Kewajiban

Kewajiban adalah bahwa entitas mempunyai kewajiban masa kini untuk bertindak atau untuk melakukan sesuatu dengan cara tertentu. Kewajiban dapat berupa kewajiban hukum dan kewajiban konstruktif. Kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundangan. Kewajiban konstruktif adalah kewajiban yang timbul dari tindakan entitas ketika:

- a. Oleh praktik baku masa lalu, kebijakan yang telah dipublikasikan atau pernyataan kini yang cukup spesifik, entitas telah memberikan indikasi kepada pihak lain bahwa entitas akan menerima tanggung jawab tertentu, dan



- b. Akibatnya, entitas telah menimbulkan ekspektasi kuat dan sah kepada pihak lain bahwa entitas akan melaksanakan tanggung jawab tersebut (SAK ETAP, 2009.2.17).

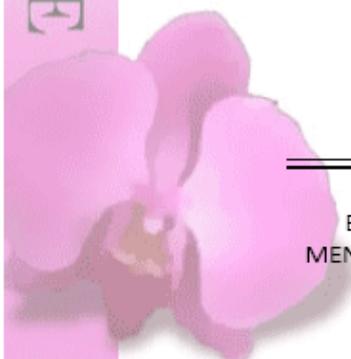
3. Ekuitas

Ekuitas adalah hak residual atas entitas setelah dikurangi semua kewajiban. Ekuitas mungkin disubklasifikasikan dalam neraca. Misalnya, entitas yang berbentuk personal terbatas subklasifikasi dapat meliputi dana yang telah dikontribusikan pemegang saham, saldo laba dan keuntungan atau kerugian yang diakui secara langsung dalam ekuitas (SAK ETAP, 2009.2.19).

4. Penghasilan

Penghasilan meliputi:

- a) Pendapatan adalah penghasilan yang timbul dalam pelaksanaan aktivitas yang biasa dan dikenal dengan sebutan berbeda. Pendapatan muncul sebagai akibat dari transaksi atau kejadian berikut:
 - a. Penjualan barang (baik diproduksi oleh entitas untuk tujuan produksi atau dibeli untuk dijual kembali),
 - b. Pemberian jasa,
 - c. Kontrak konstruksi,
 - d. Penggunaan aset entitas oleh pihak lain yang menghasilkan bunga, royalti atau deviden (SAK ETAP, 2009.20.1)
- b) Keuntungan mencerminkan pos lainnya yang memenuhi definisi namun bukan pendapatan. Ketika keuntungan diakui dalam laporan laba rugi, biasanya disajikan secara terpisah karena pengetahuan mengenai pos pos tersebut berguna untuk mengambil keputusan ekonomi (SAK ETAP, 2009.2.22).



5. Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi selama suatu periode pelaporan dalam bentuk arus kas atau penurunan aset, atau terjadinya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak terkait dengan distribusi kepada penanam modal. Beban mencakup kerugian dan beban yang timbul dalam pelaksanaan aktivitas entitas biasa.

- a. Beban yang timbul dalam pelaksanaan aktivitas entitas yang biasa meliputi, misalnya, beban pokok penjualan, upah, dan penyusutan. Beban tersebut biasanya berbentuk arus kas keluar atau berkurangnya aset seperti kas dan setara kas, persediaan dan aset tetap.
- b. Kerugian yang mencerminkan pos lain yang memenuhi definisi beban yang mungkin, atau mungkin tidak, timbul dari pelaksanaan aktivitas entitas yang biasa. Ketika kerugian diakui dalam laporan laba rugi, biasanya disajikan secara terpisah karena pengetahuan mengenai pos tersebut berguna untuk mengambil keputusan ekonomi (SAK ETAP, 2009.2.23).

Pengakuan beban merupakan akibat langsung dari pengakuan aset dan kewajiban. Beban diakui dalam laporan laba rugi jika penurunan manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan dengan penurunan aset dan kewajiban telah terjadi dan dapat diukur secara andal (SAK ETAP, 2009.2.37).